

## ABSTRAK

**Ian Gustaman** : *Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagaimana Diatur Dalam UU No.12 Tahun 2008 Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah*

Lahirnya UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menghadirkan fenomena politik baru dalam momentum pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam undang-undang ini peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak hanya terbatas pada pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, melainkan juga terbuka luas bagi calon perseorangan. Hal ini sebagai perwujudan dari prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam ide politik demokrasi, bahwa dalam demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk duduk dalam suatu jabatan pemerintahan. Oleh karena itu, pembatasan terhadap akses untuk memilih dan dipilih secara bebas merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap demokrasi.

Penelitian ini bertolak pada prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam al-Quran sebagai sumber pokok fiqh siyasah dusturiyah. Bahwa di dalam al-Quran terdapat sejumlah ayat yang mengandung prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan bernegara, seperti prinsip persamaan, kebebasan, keadilan, dan musyawarah. Juga bertolak pada konsep dan teori siyasah dusturiyah tentang pemilihan kepemimpinan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui calon perseorangan dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam UU No.12 Tahun 2008. Kemudian untuk mengetahui relevansi atas masalah tersebut dengan fiqh siyasah dusturiyah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu penelitian untuk membuat gambaran mengenai ketentuan peraturan yang terdapat dalam UU No.12 Tahun 2008 yang berkenaan dengan calon perseorangan dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah calon perseorangan dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan sejumlah literatur yang berkenaan dengan fiqh siyasah dusturiyah. Adapun sumber data skunder berupa literatur-literatur terkait sebagai penunjang dalam melakukan pembahasan atas masalah yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme yang ditempuh oleh calon perseorangan dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam UU No.12 Tahun 2008 tidak sesuai dengan konsep dan teori pemilihan kepemimpinan dalam siyasah dusturiyah. Akan tetapi, ditinjau dari sudut pandang prinsip-prinsip yang digunakan sebagai landasan untuk mengakomodasi calon perseorangan dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil

kepala daerah sebagaimana yang terkandung dalam UU No.12 Tahun 2008 relevan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar siyasah dusturiyah. Prinsip demokrasi yang meliputi prinsip kebebasan, persamaan, dan keadilan yang menjadi landasan diakomodasinya calon perseorangan dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh undang-undang relevan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam al-Quran sebagai sumber pokok siyasah dusturiyah. Dalam al-Quran secara keseluruhan mengajarkan demokratisasi dengan keharusan menjalankan prinsip musyawarah, persamaan, kebebasan, dan keadilan.